

Tersedia online di

<http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/jimek>



## Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antarwilayah (Studi di Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia) Tahun 2014-2018

Fitri Wahyu Dewanto<sup>1</sup>, Farida Rahmawati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Negeri Malang*

*email: <sup>1</sup>[f.wahyudewanto@gmail.com](mailto:f.wahyudewanto@gmail.com), <sup>2</sup>[farida.rahmawati.fe@um.ac.id](mailto:farida.rahmawati.fe@um.ac.id)*

### ABSTRAK

#### **Artikel History:**

Artikel masuk  
Artikel revisi  
Artikel diterima

#### **Keywords:**

*Indeks Williamson, IPM,  
Kemiskinan, PDRB per Kapita,  
Ketimpangan Pembangunan*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat ketimpangan pembangunan antarprovinsi di Indonesia dan mengetahui ketimpangan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. Analisis data ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah dilakukan dengan menggunakan Indeks Williamson. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan regresi data panel. Pengumpulan data dilakukan dengan mengunduh data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang diperoleh antara lain Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Kemiskinan, dan Produk Domestik Regional Bruto di 34 Provinsi di Indonesia tahun 2014-2018. Temuan menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia cukup tinggi yang disebabkan pembangunan ekonomi yang tidak merata. Selain itu, tingginya ketimpangan pembangunan ditentukan oleh sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tidak merata dan kurang efektif dalam pengelolaannya.

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the level of development inequality between provinces in Indonesia and to determine the inequality of development between the Western Region of Indonesia and the Eastern Region of Indonesia. Analysis of data on the inequality of economic development between regions was carried out using the Williamson Index. This research uses quantitative research using panel data regression. Data collection is done by downloading secondary data from Badan Pusat Statistik (BPS). The data obtained include the Human Development Index, Poverty Index, and Gross Regional Domestic Product in 34 Provinces in Indonesia in 2014-2018. The findings indicate that the development gap between the Western Region of Indonesia and the Eastern Region of Indonesia is quite high due to uneven economic development. In addition, the high inequality of development is determined by natural and human resources that are not evenly distributed and ineffective in their management.*

**PENDAHULUAN**

Pembangunan merupakan proses kegiatan yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua negara baik negara maju dan negara berkembang termasuk Indonesia, karena era globalisasi yang diikuti dengan kemajuan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan telah memberikan dampak pada perubahan dan pembaharuan dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Sehingga dalam proses pembangunan harus mencakup seluruh aspek baik dalam aspek ekonomi maupun aspek sosial. Menurut (Sukirno, 2006) Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk sesuatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi dan institusional demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik (Todaro & Smith, 2006).

Awal pembangunan ekonomi di Indonesia mengalami banyak hambatan dalam merealisasikan pembangunan ekonomi yang merata di setiap wilayah, beberapa wilayah mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat, sementara di wilayah lain mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat. Kekayaan alam yang dimiliki setiap wilayah seharusnya dapat menjadikan nilai tambah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Kelebihan yang dimiliki tersebut diharapkan memberikan dampak menyebar (*spread effect*). Hanya saja kekayaan alam di setiap wilayah memiliki kandungan yang berbeda-beda di 34 Provinsi di Indonesia dan secara merata. Dari hal ini yang menyebabkan timbulnya ketimpangan atau kesenjangan antarwilayah.

Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional, Kawasan Timur Indonesia (KTI) selalu mendapatkan perhatian dan prioritas dari pemerintah. Namun, hingga kini pertumbuhan ekonomi, pemerataan hasil-hasil pembangunan dan kemampuan daerah di Kawasan Timur Indonesia dalam keseluruhan upaya dan hasil pembangunan nasional masih tertinggal dibandingkan Kawasan Barat Indonesia (KBI) pada umumnya. Hal ini disebabkan karena sebagian besar pusat perekonomian riil dan pasar berlokasi di Kawasan Barat Indonesia dan sebagian besar penduduk bermukim di kawasan ini, sehingga sebagian besar kegiatan perekonomian riil memang sejalan dengan mekanisme pasar.

IPM adalah tolok ukur untuk mencapai pembangunan kualitas manusia yang berdasarkan beberapa bagian standar kualitas hidup. IPM terdiri dari beberapa bagian antara lain angka melek huruf, angka partisipasi sekolah dan rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah dapat mengukur pembangunan di bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli

masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dapat dilihat dari besarnya pengeluaran per kapita.

Kemiskinan didefinisikan sebagai standar hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Secara ekonomis, kemiskinan juga dapat diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang (Murjana, 2008).

PDRB merupakan nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi disuatu daerah dalam waktu tertentu. Menurut (Sukmaraga, P. & Hayati, 2011) PDRB per kapita dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan perekonomian pada suatu wilayah. PDRB juga dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki, besarnya PDRB yang dihasilkan oleh suatu daerah ditentukan berdasarkan potensi sumber daya alam dan faktor produksi yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Perbedaan PDRB yang diperoleh suatu wilayah dengan wilayah lain yaitu adanya keterbatasan dalam menyediakan faktor-faktor produksi. PDRB per kapita dihitung dari PDRB berdasarkan harga konstan dibagi dengan jumlah penduduk dalam suatu wilayah tertentu.

PDRB yang meningkat akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan secara makro. Meskipun belum tentu menjamin pemerataan pendapatan antar golongan penduduk sejauh ini data PDRB masih cukup mampu untuk menggambarkan kinerja perekonomian suatu daerah. PDRB per kapita diperoleh dari total PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per kapita dapat dipakai sebagai indikator produktivitas rata-rata penduduk suatu daerah. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Besarnya PDRB atas dasar harga konstan tahun ini (t) dikurangi tahun sebelumnya (t-1) dikalikan seratus persen menunjukkan persentase pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tahun ini (t).

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam ketimpangan pembangunan di Indonesia. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian dengan judul “Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antarwilayah (Studi di Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia) Tahun 2014-2018”.

**Ketimpangan Pembangunan**

Secara teoritis, permasalahan ketimpangan pembangunan antarwilayah mula mula dimunculkan oleh Douglas C North dalam analisisnya tentang Teori Pertumbuhan Neo-Klasik. Dalam teori tersebut dimunculkan sebuah prediksi tentang hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antarwilayah. Hipotesa ini kemudian lazim dikenal sebagai Hipotesa Neo-Klasik (Sjafrizal, 2008).

Menurut Hipotesa Neo-klasik, pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antarwilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, bila proses pembangunan terus berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antarwilayah tersebut akan menurun (Sjafrizal, 2008).

Adapun faktor-faktor yang menentukan ketimpangan pembangunan antarwilayah antara lain konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah, mobilitas barang dan faktor produksi antar daerah serta alokasi investasi antarwilayah dengan wilayah lainnya. Bahkan kebijakan yang dilakukan oleh suatu daerah dapat pula mempengaruhi ketimpangan pembangunan regional. Oleh karena itu, untuk menghitung tingkat ketimpangan wilayah digunakan metode yaitu Indeks Williamson.

Ketimpangan pada kenyataannya tidak dapat dihilangkan dalam pembangunan suatu daerah. Adanya ketimpangan, akan memberikan dorongan kepada daerah yang terbelakang untuk dapat berusaha meningkatkan kualitas hidupnya agar tidak jauh tertinggal dengan daerah sekitarnya. Selain itu daerah-daerah tersebut akan bersaing guna meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga ketimpangan dalam hal ini memberikan dampak positif. Akan tetapi ada pula dampak negatif yang ditimbulkan dengan semakin tingginya ketimpangan antarwilayah. “Dampak negatif tersebut berupa inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil” (Todaro, 2004).

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa ketimpangan pembangunan merupakan suatu kesenjangan atau keadaan yang tidak adil yang disebabkan karena ketidakmerataan pembangunan pada suatu wilayah.

## Indeks Pembangunan Manusia

IPM adalah tolok ukur untuk mencapai pembangunan kualitas manusia yang berdasarkan beberapa bagian standar kualitas hidup. IPM terdiri dari beberapa bagian antara lain angka melek huruf, angka partisipasi sekolah dan rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah dapat mengukur pembangunan di bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dapat dilihat dari besarnya pengeluaran per kapita.

Kategori IPM menurut UNDP terdapat 4 kategori yaitu (1) Rendah ketika suatu negara atau wilayah memiliki  $IPM < 50$ , (2) menengah kebawah ketika suatu negara atau wilayah memiliki angka  $50 < IPM < 66$ , (3) Menengah atas ketika suatu negara atau wilayah memiliki angka  $66 < IPM < 80$  dan (4) Tinggi ketika suatu negara atau wilayah memiliki angka  $IPM > 80$ .

## Kemiskinan

Kemiskinan didefinisikan sebagai standar hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Secara ekonomis, kemiskinan juga dapat diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang (Murjana, 2008).

Kemiskinan juga dapat didefinisikan sebagai “ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum”. Kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dipenuhi tersebut meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun nonmakan. Kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat konsumsi seseorang dengan garis kemiskinan atau jumlah rupiah yang dikeluarkan untuk konsumsi orang perbulan. Sedangkan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan (Mudrajat, 2006).

## PDRB per kapita

Produk domestik regional bruto (PDRB) adalah total nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi suatu wilayah dalam periode tertentu (biasanya satu tahun) tanpa memperhatikan kepemilikan faktor produksi (BPS, 2000). Nilai tambah bruto adalah selisih dari seluruh produk yang dihasilkan oleh sektor-sektor produksi dengan memanfaatkan faktor produksi yang tersedia di suatu wilayah.

Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antarwilayah (Studi di Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia) Tahun 2014-2018

<http://dx.doi.org/10.30737/ekonika.xxx>

© 2020 Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri. Semua hak cipta dilindungi undang-undang



PDRB merupakan nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi disuatu daerah dalam waktu tertentu. Menurut (Sukmaraga, P. & Hayati, 2011). PDRB per kapita dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan perekonomian pada suatu wilayah. PDRB juga dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki, besarnya PDRB yang dihasilkan oleh suatu daerah ditentukan berdasarkan potensi sumber daya alam dan faktor produksi yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Perbedaan PDRB yang diperoleh suatu wilayah dengan wilayah lain yaitu adanya keterbatasan dalam menyediakan faktor-faktor produksi. PDRB per kapita dihitung dari PDRB berdasarkan harga konstan dibagi dengan jumlah penduduk dalam suatu wilayah tertentu.

PDRB yang meningkat akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan secara makro. Meskipun belum tentu menjamin pemerataan pendapatan antar golongan penduduk sejauh ini data PDRB masih cukup mampu untuk menggambarkan kinerja perekonomian suatu daerah. PDRB per kapita diperoleh dari total PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per kapita dapat dipakai sebagai indikator produktivitas rata-rata penduduk suatu daerah. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Besarnya PDRB atas dasar harga konstan tahun ini ( $t$ ) dikurangi tahun sebelumnya ( $t-1$ ) dikalikan seratus persen menunjukkan persentase pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tahun ini ( $t$ ).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat ketimpangan pembangunan antarprovinsi di Indonesia dan mengetahui ketimpangan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia dengan menggunakan variabel IPM, Kemiskinan, dan PDRB per kapita. Dengan adanya penelitian ini di harapkan mampu memberi kontribusi ilmu pengetahuan di bidang ekonomi pembangunan dan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, hipotesis yang dirumuskan yaitu, (1) Diduga terdapat hubungan negatif antara IPM dengan ketimpangan pembangunan, (2) Diduga terdapat hubungan positif antara kemiskinan dengan ketimpangan pembangunan, (3) Diduga terdapat hubungan positif antara PDRB per kapita dengan ketimpangan pembangunan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode analisis data panel yang dapat dilakukan dengan tiga metode estimasi, yaitu estimasi *common effect model*, *fixed effect model*, dan *random effect model*. Pemilihan metode disesuaikan dengan

data yang tersedia dan reliabilitas antara variabel. Sebelum melakukan analisis regresi, langkah yang dilakukan adalah melakukan pengujian estimasi model untuk memperoleh estimasi model yang tepat digunakan. Data penelitian diperoleh dari Badan Pusat Statistik untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Kemiskinan, dan PDRB per kapita terhadap Ketimpangan Pembangunan antarwilayah di 34 Provinsi di Indonesia. Prosedur pengumpulan data meliputi pengunduhan data sekunder dari laman web resmi Badan Pusat Statistik. Pendokumentasian data dilakukan dengan menggunakan data yang tersedia dari instansi terkait. Selain itu, proses pengolahan data Indeks Williamson menggunakan Ms. Excel dengan data yang diperoleh dari BPS.

Penelitian ini menggunakan model analisis ketimpangan pembangunan ekonomi antardaerah dengan menggunakan Indeks Williamson. Sebelum melakukan analisis regresi, langkah yang dilakukan adalah melakukan pengujian estimasi model untuk memperoleh estimasi model yang tepat digunakan. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \mu_{it}$$

Dimana :

- Y : Ketimpangan pembangunan ekonomi
- X<sub>1</sub> : Indeks Pembangunan Manusia
- X<sub>2</sub> : Indeks Kemiskinan
- X<sub>3</sub> : PDRB per kapita
- $\beta$  : Koefisien regresi
- $\alpha$  : Konstanta
- $\mu$  : Error term
- i : Cross Section 34 Provinsi di Indonesia
- t : Time Series tahun 2014-2018

	Y	X1	X2	X3
Mean	0.079200	69.17171	11.22912	39376.53
Median	0.049500	69.32000	9.555000	30473.51
Maximum	0.374000	80.47000	28.40000	165863.3
Minimum	0.010000	56.75000	3.550000	10742.32
Std. Dev	0.072253	4.149326	5.905537	29991.11
Skewness	2.239365	0.038219	0.997253	2.393255
Kurtosis	8.893256	4.208606	3.524471	8.516536
Jarque-Bera	388.0923	10.38821	30.12629	377.8452
Probability	0.000000	0.005549	0.000000	0.000000
Sum	13.46400	11759.19	1908.950	6694010.
Sum Sq. Dev.	0.882259	2909.658	5893.936	1.52E+11
Observations	170	170	170	170

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Sumber : Data diolah (2020)

Dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah sampel provinsi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 34 provinsi yang diteliti selama 5 tahun. Diketahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ( $X_1$ ) pada 34 sampel provinsi periode 2014-2018 memiliki nilai tertinggi sebesar 80,47 yang diperoleh oleh Provinsi DKI Jakarta dan nilai terendah adalah sebesar 56,75 yang diperoleh oleh Provinsi Papua, sedangkan rata-rata IPM 34 sampel provinsi dari tahun 2014-2018 sebesar 69,17171.

Diketahui bahwa Indeks Kemiskinan ( $X_2$ ) pada 34 sampel provinsi periode 2014-2018 memiliki nilai tertinggi sebesar 28,4 yang diperoleh oleh Provinsi Papua dan nilai terendah adalah sebesar 3,55 yang diperoleh oleh Provinsi DKI Jakarta, sedangkan rata-rata Indeks Kemiskinan 34 sampel provinsi dari tahun 2014-2018 sebesar 11,22912.

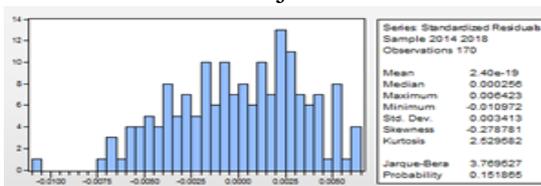
Diketahui bahwa nilai PDRB per kapita ( $X_3$ ) pada 34 sampel provinsi periode 2014-2018 memiliki nilai tertinggi sebesar 165863,3 yang diperoleh Provinsi DKI Jakarta dan nilai terendah adalah sebesar 10742,32 yang diperoleh oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan rata-rata PDRB per kapita 34 sampel provinsi dari tahun 2014-2018 sebesar 39376,53.

### Uji Asumsi Klasik

Adapun dalam uji asumsi klasik, dilakukan dalam 4 tahap yakni, uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi.

### Uji Normalitas

Gambar 1. Uji Normalitas



Sumber : Data diolah (2020)

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa nilai dari Uji Jarque-Bera sebesar 3,769527 dan nilai probabilitas sebesar  $0,151865 > 0,05$ . Pengambilan kaidah keputusan dapat menggunakan nilai probabilitas. Nilai probabilitas sebesar 0,151865 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

### Uji Multikolinieritas

Tabel 4. Uji Multikolinieritas

	X1	X2	X3
X1	1.000000	-0.638966	0.438745
X2	-0.638966	1.000000	-0.452461
X3	0.438745	-0.452461	1.000000

Sumber : Data diolah (2020)

Pada tabel di atas dapat dikatakan bahwa angka korelasi antar variabel bebas dalam penelitian ini semuanya kurang dari 0,8. Dapat disimpulkan bahwa asumsi bisa terpenuhi yang artinya variabel-variabel bebas dari gangguan multikolinieritas.

### Uji Heterokedastisitas

Tabel 5. Uji Heterokedastisitas

Dependent Variable: RESABS  
Method: Panel Least Squares  
Date: 12/18/20 Time: 22:17  
Sample: 2014 2018  
Periods included: 5  
Cross-sections included: 34  
Total panel (balanced) observations: 170

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.010408	0.013730	0.758016	0.4495
X1	-0.001167	0.003188	-0.366120	0.7147
X2	-0.000445	0.000376	-1.182837	0.2386
X3	-0.000154	0.000299	-0.515436	0.6069
R-squared	0.009088	Mean dependent var		0.002844
Adjusted R-squared	-0.008820	S.D. dependent var		0.001874
S.E. of regression	0.001882	Akaike info criterion		-9.689377
Sum squared resid	0.000588	Schwarz criterion		-9.615593
Log likelihood	827.5970	Hannan-Quinn criter.		-9.659436
F-statistic	0.507462	Durbin-Watson stat		1.703193
Prob(F-statistic)	0.677662			

Sumber : Data diolah (2020)

Dari hasil tabel di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas untuk semua variabel independen berada di atas 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat heterokedastisitas dalam model regresi.

## Uji Autokorelasi

R-squared	0.997768	Mean dependent var	0.079200
Adjusted R-squared	0.997164	S.D. dependent var	0.072253
S.E. of regression	0.003847	Akaike info criterion	-8.092947
Sum squared resid	0.001969	Schwarz criterion	-7.410450
Log likelihood	724.9005	Hannan-Quinn criter.	-7.815997
F-statistic	1651.842	Durbin-Watson stat	1.914349
Prob(F-statistic)	0.000000		

Tabel 6. Uji Autokorelasi

Sumber : Data diolah (2020)

Pada tabel di atas dijelaskan bahwa Durbin Watson sebesar 1,914349. Nilai  $dL$  sebesar 1,2707 dan nilai  $dU$  sebesar 1,6519. Dilihat dari tabel 4.9 maka menggunakan asumsi  $dU < d < 4-dU$ , atau  $1,6519 < 1,914349 < 2,3481$ . Maka dapat disimpulkan bahwa model tidak terjadi autokorelasi.

## Uji Signifikansi

Uji Signifikansi meliputi uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), uji parsial, dan uji simultan.

## Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Tabel 7. Uji  $R^2$

R-squared	0.997768	Mean dependent var	0.079200
Adjusted R-squared	0.997164	S.D. dependent var	0.072253
S.E. of regression	0.003847	Akaike info criterion	-8.092947
Sum squared resid	0.001969	Schwarz criterion	-7.410450
Log likelihood	724.9005	Hannan-Quinn criter.	-7.815997
F-statistic	1651.842	Durbin-Watson stat	1.914349
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Data diolah (2020)

Variabel ketimpangan pembangunan (Y) dijelaskan sebesar 0,997768 atau 99,71% oleh variabel Indeks Pembangunan Manusia ( $X_1$ ), Indeks Kemiskinan ( $X_2$ ), PDRB per kapita ( $X_3$ ). Sedangkan sisanya 0,29% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

## Uji Parsial (Uji t)

Tabel 8. Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.495233	0.141770	3.493213	0.0006
X1	-0.176485	0.047855	-3.687947	0.0003
X2	0.021474	0.007084	3.031106	0.0029
X3	0.027144	0.010561	2.570167	0.0113

Sumber : Data diolah (2020)

### **Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Ketimpangan Pembangunan**

Hasil uji t menunjukkan pengaruh parsial Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Pembangunan dilihat dari nilai probabilitasnya. Jika probabilitasnya kurang dari 0,05 maka variabel berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pembangunan. Dalam tabel di atas Indeks Pembangunan Manusia ( $X_1$ ) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0003 yang berarti kurang dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh secara signifikan terhadap Ketimpangan Pembangunan.

### **Pengaruh Indeks Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pembangunan**

Hasil uji t menunjukkan pengaruh parsial Indeks Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pembangunan dilihat dari nilai probabilitasnya. Jika probabilitasnya kurang dari 0,05 maka variabel berpengaruh secara signifikan terhadap Ketimpangan Pembangunan. Dalam tabel di atas Indeks Kemiskinan ( $X_2$ ) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0029 yang berarti kurang dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan Indeks Kemiskinan berpengaruh secara signifikan terhadap Ketimpangan Pembangunan.

### **Pengaruh PDRB per kapita terhadap Ketimpangan Pembangunan**

Hasil uji t menunjukkan pengaruh parsial PDRB per kapita terhadap ketimpangan pembangunan dilihat dari nilai probabilitasnya. Jika probabilitas kurang dari 0,05 maka variabel berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pembangunan. Dalam tabel di atas PDRB per kapita ( $X_3$ ) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0113 yang berarti kurang dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan PDRB per kapita berpengaruh secara signifikan terhadap Ketimpangan Pembangunan.

### **Uji Simultan (Uji F)**

Tabel 9. Uji F

R-squared	0.997768	Mean dependent var	0.079200
Adjusted R-squared	0.997164	S.D. dependent var	0.072253
S.E. of regression	0.003847	Akaike info criterion	-8.092947
Sum squared resid	0.001969	Schwarz criterion	-7.410450
Log likelihood	724.9005	Hannan-Quinn criter.	-7.815997
F-statistic	1651.842	Durbin-Watson stat	1.914349
Prob(F-statistic)	0.000000		

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas F statistik dengan p-value sebesar 0,000000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti  $H_0$  ditolak. Dengan demikian Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Kemiskinan, PDRB per kapita secara bersama-sama berpengaruh terhadap Ketimpangan Pembangunan di 34 Provinsi di Indonesia.

Hasil estimasi antara indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di 34 provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif tetapi signifikan terhadap ketimpangan pembangunan. Nilai koefisien menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan. Semakin IPM tinggi maka akan menurunkan ketimpangan pembangunan, dikarenakan dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada di setiap wilayah mampu terserap dengan maksimal diperlukan kualitas sumber daya manusia yang baik, IPM adalah salah satu ukuran bagaimana kualitas tingkat SDM yang ada di setiap wilayah, apabila tingkat SDM semakin baik maka penduduk akan sejahtera sehingga pembangunan ekonomi meningkat. Dengan adanya IPM yang semakin tinggi dan merata, maka akan menurunkan ketimpangan pembangunan di 34 provinsi di Indonesia.

Semakin tinggi pendidikan formal yang diperoleh individu, maka produktivitas tenaga kerja akan semakin tinggi pula. Menurut (Widiansyah, 2017) menyatakan bahwa dalam teori human capital, kontribusi pendidikan sangat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Kontribusi tersebut dapat dicapai melalui peningkatan keterampilan dan produktivitas kerja. Petumbuhan Ekonomi yang cepat di Negara-negara Asia dan perubahan progresif dalam produksi menuju industry dan jasa berteknologi tinggi mengakibatkan meningkatnya tuntutan dari dunia usaha terhadap perlunya SDM yang terampil dan terdidik (berkualitas). SDM yang berkualitas tersebut hanya dapat dihasilkan oleh sebuah sistem pendidikan yang berkualitas pula.

Berdasarkan hasil estimasi antara indeks kemiskinan terhadap ketimpangan pembangunan di 34 provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi. Nilai koefisien menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh positif terhadap ketimpangan pembangunan. Ketika angka kemiskinan meningkat maka ketimpangan pembangunan juga akan meningkat, karena pada saat seseorang hidup di bawah garis kemiskinan, mereka tidak memberikan kontribusi dalam kegiatan ekonomi sehingga output yang dihasilkan rendah. Hal ini dapat diartikan jika kemiskinan berpengaruh positif dalam meningkatkan ketimpangan pembangunan.

Konsep kemiskinan menurut BPS dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) makanan dan bukan bahan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Kemiskinan berkaitan satu sama lain dengan berbagai macam dimensi kebutuhan manusia. “Ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup dapat dikatakan sebagai kemiskinan” (Todaro & Smith, 2006). “Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang” (Murjana, 2008). Ketika angka kemiskinan meningkat maka ketimpangan pembangunan juga meningkat, karena pada saat seseorang hidup dibawah garis kemiskinan, mereka tidak memberikan kontribusi dalam kegiatan ekonomi sehingga output yang dihasilkan rendah.

Berdasarkan hasil estimasi antara PDRB per kapita terhadap ketimpangan pembangunan di 34 provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa PDRB per kapita berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi. Nilai koefisien menunjukkan bahwa PDRB per kapita berpengaruh positif terhadap ketimpangan pembangunan. Hal ini dapat diartikan jika PDRB per kapita semakin tinggi suatu daerah maka akan semakin meningkatkan ketimpangan daerah.

PDRB baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap masalah ketimpangan wilayah. “Ketimpangan dalam perkembangan ekonomi antara berbagai daerah pada suatu wilayah yang akan menyebabkan pula ketimpangan tingkat pendapatan per kapita antar daerah” (Mudrajat, 2004). Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi yang meningkat di suatu daerah akan tetapi tidak diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah lain akan menyebabkan ketimpangan pembangunan menjadi semakin tinggi, hal ini terjadi karena pada awal-awal pembangunan pelaku ekonomi lebih memilih berinvestasi pada daerah-daerah yang relatif maju dengan infrastruktur yang lengkap, banyak tenaga kerja yang terlatih, peluang bisnis tersedia sehingga daerah yang tadinya sudah maju menjadi semakin maju dan daerah lain semakin tertinggal. Sehingga keadaan ini akan mendorong naiknya ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah.

## **SIMPULAN & SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif tetapi signifikan terhadap Ketimpangan Pembangunan di 34 Provinsi di Indonesia. Artinya jika variabel Indeks Pembangunan Manusia meningkat, maka variabel ketimpangan pembangunan akan menurun. Hal ini karena Semakin IPM tinggi

maka akan menurunkan ketimpangan pembangunan, dikarenakan dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada di setiap wilayah mampu terserap dengan maksimal diperlukan kualitas sumber daya manusia yang baik, IPM adalah salah satu ukuran bagaimana kualitas tingkat SDM yang ada di setiap wilayah, apabila tingkat SDM semakin baik maka penduduk akan sejahtera sehingga pembangunan ekonomi meningkat.

Variabel Kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pembangunan di 34 Provinsi di Indonesia. Artinya jika variabel kemiskinan meningkat maka akan diikuti dengan meningkatnya variabel ketimpangan pembangunan. Hal ini karena ketika angka kemiskinan meningkat maka ketimpangan pembangunan juga akan meningkat, karena pada saat seseorang hidup di bawah garis kemiskinan, mereka tidak memberikan kontribusi dalam kegiatan ekonomi sehingga output yang dihasilkan rendah.

Variabel PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pembangunan di 34 Provinsi di Indonesia. Artinya jika variabel PDRB per kapita meningkat, akan memberikan pengaruh meningkat pula pada variabel ketimpangan pembangunan. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi yang meningkat di suatu daerah akan tetapi tidak diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah lain akan menyebabkan ketimpangan pembangunan menjadi semakin tinggi, hal ini terjadi karena pada awal-awal pembangunan pelaku ekonomi lebih memilih berinvestasi pada daerah-daerah yang relatif maju dengan infrastruktur yang lengkap, banyak tenaga kerja yang terlatih, peluang bisnis tersedia sehingga daerah yang tadinya sudah maju menjadi semakin maju dan daerah lain semakin tertinggal. Sehingga keadaan ini akan mendorong naiknya ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah.

Secara simultan Indeks Pembangunan Manusia, Kemiskinan, dan PDRB per kapita berpengaruh terhadap Ketimpangan Pembangunan di 34 Provinsi di Indonesia.

## Saran

Untuk mengatasi permasalahan ketimpangan pembangunan antara kawasan barat dan kawasan timur Indonesia, pemerintah harus memberikan kebijakan yang lebih efektif dan efisien dalam mengurangi ketimpangan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia dan memberikan pelayanan dan fasilitas sarana dan prasarana yang baik, khususnya di Kawasan Timur Indonesia. Selain itu, pemerintah harus memihak masyarakat dalam menentukan kebijakan, agar tidak merugikan masyarakat sendiri. Pemerintah harus menarik para investor untuk berinvestasi di Luar Pulau Jawa dan pembangunan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia lebih berfokus untuk peningkatan

kualitas Sumber Daya Manusia serta kesehatan, karena dengan kualitas kesehatan dan Sumber Daya Manusia yang lebih baik merupakan asset yang berharga dalam jangka panjang dan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk. Selain itu perlu digencarkan sosialisasi pengelolaan Sumber Daya Alam yang baik agar tidak merusak lingkungan yang mengakibatkan bencana alam, sehingga dengan kebijakan dan infrastruktur yang baik dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah antara kawasan barat dan kawasan timur Indonesia

## DAFTAR PUSTAKA<sup>[u1]</sup>

- BPS. (2000). *Produk Domestik Regional Bruto*. Badan Pusat Statistik.
- Mudrajat, K. (2004). *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan*. UPP AMP YKPN.
- Mudrajat, K. (2006). *Pembangunan Daerah*. Erlangga.
- Murjana, Y. (2008). Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Partisipasi Masyarakat di Provinsi Bali. *Ekonomi Dan Sosial, Volume 2*,  
<https://www.neliti.com/publications/43814/penanggulangan-kemiskinan-berbasis-partisipasi-masyarakat-di-provinsi-bali>
- Sjafrizal. (2008). *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Baduose Media.
- Sukirno, S. (2006). *Ekonomi Pembangunan*. Bima Grafika.
- Sukmaraga, P. & Hayati, B. (2011). *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB per kapita, dan Jumlah Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah*. <http://eprints.undip.ac.id/26773/>
- Todaro, M. (2004). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (edisi ke 8). Erlangga.
- Todaro, M., & Smith, S. (2006). *Pembangunan Ekonomi Jilid ke-1 (Penerjemah Mundar H, Puji AL)* (D. Barnadi, S. Saat, & W. Hardani (eds.); Edisi ke-9). Erlangga.